



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDI SUKARMAN
2. Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
3. NHK : 414183

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	50.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG/MINI BUS Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.809.061
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	413.509.061
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	413.509.061

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAMITDRI
2. Jabatan : PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA
3. NHHK : 550708

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	115.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	17.500.000
1. MOTOR, YAMAHA ZUPITER Z 1 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA GTR 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	23.300.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.400.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	160.200.000
III. HUTANG	Rp.	153.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU SETIAWAN
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
3. NHK : 415720

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	395.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 395.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	153.500.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 148.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.739.620
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	556.739.620
III. HUTANG	Rp.	107.308.056
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	449.431.564

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
 (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASJUAINI
 2. Jabatan : PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA
 3. NHK : 403926

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	310.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
3. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
4. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	93.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT 125 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA YUPETER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/AVANSA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.656.196
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	425.156.196
III. HUTANG	Rp.	137.750.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	287.406.196

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOOR AIDA
2. Jabatan : PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA
3. NHK : 659687

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 313.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 13 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 15.400.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 17.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 14.000.000

1. MOTOR, REVO NF11T11C01 M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.520.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 116.191.731**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 458.011.731

III. HUTANG Rp. 211.040.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 246.971.731

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.